

TAX MAG

BY

 **PRIMESERVICES** international
Registered Tax Consultant and Business Advisory



EDISI 2

Februari 2021

Industri Manufaktur Mendorong
Penguatan Ekspor

UU HPP Digugat ke Mahkamah
Konstitusi

Segera Update! Aplikasi M-Pajak
Kini Punya Dua Fitur Baru Buat
UMKM

DAFTAR ISI

- Investasi Terbesar Kedua dari Amerika Serikat Telah Resmi Masuk ke Indonesia** **Hlm 1**

- Industri Manufaktur Mendorong Penguatan Ekspor** **Hlm 2**

- UU HPP Digugat ke Mahkamah Konstitusi** **Hlm 3**

- Sekarang Insentif bagi Wirausahawan Sudah Diatur Dalam Perpres!** **Hlm 4**

- Produk Baja Indonesia Kini Bebas Bea Masuk Anti-Dumping ke India** **Hlm 5**

- Penegasan Biaya Pencegahan Covid 19** **Hlm 6**

- Segera Update! Aplikasi M-Pajak Kini Punya Dua Fitur Baru Buat UMKM** **Hlm 7**





Investasi Terbesar Kedua dari Amerika Serikat Telah Resmi Masuk ke Indonesia

The Second Largest Investment from USA Has Officially Entered Indonesia

By : Devina Elfita

Jakarta, 28 Januari 2022 - *Air Products and Chemical Inc (APCI)* telah masuk Indonesia, dengan komitmen investasi mencapai US\$ 15 miliar atau setara Rp 210 triliun. APCI merupakan investasi terbesar kedua yang berasal dari Amerika Serikat setelah PT Freeport Indonesia. APCI akan bekerja sama dengan PT Pertamina dan PT Tambah Batubara Bukit Asam Tbk (Bukit Asam). Tujuan investasi ini dilakukan untuk menggarap hilirisasi batubara di Indonesia untuk memproduksi *Dimethyl Ether/DME* atau gas layaknya gas elpiji, *methanol*, atau produk kimia lainnya, untuk menggantikan elpiji yang selama ini harus impor dari luar negeri.

Investasi ini juga akan memberikan keuntungan lainnya, yaitu: investasi ini akan menghasilkan lapangan kerja bagi sebanyak 12.000 – 13.000 orang pada tahap konstruksi dan sebanyak 11.000 – 12.000 orang pada investasi hilir di Pertamina dan PTBA. Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia berharap dari output gasifikasi batubara ini bisa mengurangi impor elpiji Indonesia yang rata-rata sekitar 6 juta -7 juta ton per tahun. Tiap satu juta ton hilirisasi bisa menghemat (subsidi) Rp 6 triliun-Rp 7 triliun dari impor elpiji.

Sumber: kontan.co.id

Jakarta, January 28, 2022 - Air Products and Chemical Inc (APCI) has entered Indonesia with an investment commitment of US\$ 15 billion or equivalent IDR 210 trillion. APCI is the second largest investment from the United States after PT Freeport Indonesia. APCI will cooperate with PT Pertamina and PT Tambah Batubara Bukit Asam Tbk (Bukit Asam/PTBA). The purpose of this investment is to work on coal downstreaming in Indonesia to produce Dimethyl Ether/DME or gas like LPG, methanol, or other chemical products, to replace LPG which had to be imported from abroad.

This investment will also provide other benefits, namely: this investment will generate employment for as many as 12,000 – 13,000 people in the construction phase and as many as 11,000 – 12,000 people in downstream investments in Pertamina and PTBA. Indonesia Minister of Investment, Bahlil Lahadalia, hopes that this coal gasification output can reduce Indonesia's LPG imports, which average around six to seven million tons per year. Each million ton of downstream can save (subsidy) of IDR six to seven trillion from imported LPG.

Source: kontan.co.id



Industri Manufaktur Mendorong Penguatan Ekspor

Manufacturing Industry Boosts Stronger Exports

By : Ellis Veronika Sitinjak

Jakarta, 28 Januari 2022 - Industri manufaktur (non-migas) semakin dominan memberikan kontribusi besar terhadap nilai ekspor nasional sehingga kinerja perdagangan pada 2022 diharapkan mampu melanjutkan tren positif. Menteri Perdagangan mengatakan ekspor industri bahan olahan meliputi: produk manufaktur yaitu *crude palm oil* (CPO) dan turunannya: besi baja, produk elektrik dan elektronika, serta kendaraan dan suku cadangnya meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor 2021 mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan menembus US\$231,54 miliar. Surplus perdagangan pada 2021 dipengaruhi oleh lonjakan ekspor ke China, AS, India, Filipina, Taiwan hingga Australia.

Kemendag menargetkan pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 7,2% pada 2022 untuk tahun 2020-2024. Namun, meningkatnya ekspor non-migas ini juga dihadapkan dengan permasalahan logistik global yang mengakibatkan adanya kelangkaan kontainer dan mahalnya biaya pengapalan. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan dirinya masih terus mencari solusi atas permasalahan logistik global.

Sumber: bisnis.com

Jakarta, January 28, 2022 - The manufacturing industry (non-oil and gas) is increasingly dominant, making a big contribution to the value of national exports so that the trading performance in 2022 is expected to continue the positive trend. The Minister of Trade said exports of the processed material industry including manufactured products namely crude palm oil (CPO) and its derivatives: steel, electrical and electronics, as well as vehicles and its spare parts increased. Central Bureau of Statistics (BPS) data records the value of 2021 exports to record the highest in history by breaking through USD 231.54 billion. The trade surplus in 2021 was impacted by a surge export to China, USA, India, Philippines, Taiwan and Australia.

The Ministry of Trade targets non-oil and gas export growth of 7.2% in 2022 for the Year 2020-2024. The increase in non-oil and gas exports is also faced with global logistics problems which result in a scarcity of containers and high shipping costs. Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, Arsjad Rasjid, said he continued looking for a solution to solve the global logistic problems.

Source: bisnis.com

UU HPP DIGUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI

HARMONIZATION OF TAX REGULATIONS LAW
WAS SUED TO CONSTITUTIONAL COURT



By : Febri Wahyudi

Jakarta, 28 Januari 2022 – UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP digugat ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan cacat formal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut Dr. Ir. Priyanto SH., MH, pembentukan UU HPP tidak memenuhi standar baku dan bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dikarenakan UU HPP mengabaikan salah satu asas pembuatan UU, yaitu asas kejelasan rumusan.

Priyanto menjelaskan, UU HPP mengandung makna UU baru, namun dalam batang tubuhnya juga melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU KUP, UU PPh, UU PPN dan UU Cukai, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian kedudukan UU HPP sebagai UU baru atau UU perubahan.

Sumber: detik.com

Jakarta, January 28, 2022 - Law No. 7 of 2021 concerning harmonization of tax regulations (HTR) was sued to the Constitutional Court on the reasons of formal defects and no binding legal force. According to Dr. Ir. Priyanto SH., MH, the establishment of the HTR Law did not meet the standards and was contrary to the 1945 Constitution. This was because the HTR Law ignored one of the principles of lawmaking, namely the principle of clarity of formulation.

Priyanto explained, the HTR Law contained the meaning of a new law, but in its body there were changes to GTPP law, Income Tax law, VAT law, and Excise law, giving rise to ambiguity and uncertainty about the position of the HTR Law as a new law or amendments to the law.

Source: detik.com



Sekarang Insentif bagi Wirausahawan Sudah Diatur Dalam Perpres!

Incentives for Entrepreneurs are Now Regulated in a Presidential Regulation!

By : M. Halim Pratama & Kevin Kusnadi

Jakarta, 28 Januari 2022 - Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 -2024 yang mulai berlaku pada 3 Januari 2022. Melalui Perpres ini diharapkan rasio kewirausahaan di Indonesia yang saat ini masih berada di angka 3,47% dapat tumbuh mencapai 3,95% pada tahun 2024.

Pepres ini memberikan:

a. Kemudahan seperti:

- Pendaftaran perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik;
- Akses pembiayaan dan penjaminan; dan
- Pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

b. Insentif diberikan dalam bentuk:

- Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Subsidi bunga pinjaman pada kredit program pemerintah; dan
- Fasilitas pajak penghasilan (PPh).

Sumber: detik.com

Jakarta, January 28, 2022 - The government issued Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning National Entrepreneurship Development in 2021 -2024 that had come into effect since January 3, 2022. Meanwhile, the issuance purpose of Presidential Regulation was to increase the entrepreneurship ratio in Indonesia which was currently still at 3.47% to grow up to 3.95% in 2024.

This presidential regulation provides:

a. Facilities namely:

- *Registration of business licenses that are integrated electronically;*
- *Access to financing and guarantees; and*
- *Prioritizing government procurement of goods and services.*

b. Incentives in the forms of:

- *Reduction, relief, and/or exemption from regional taxes and regional retribution;*
- *Subsidized loan interest on government programs credit; and*
- *Income tax (IT) facilities.*

Source: detik.com

PRODUK BAJA INDONESIA KINI BEBAS BEA MASUK ANTI-DUMPING KE INDIA

By : Ryan

**INDONESIAN STEEL PRODUCTS ARE
NOW FREE OF ANTI-DUMPING DUTIES
TO INDIA**

Jakarta, 28 Januari 2022 - Ekspor produk *hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel* (HRFPANA) Indonesia berhasil bebas bea masuk anti-dumping (BMAD) ke India. Hal ini terjadi karena Kementerian Keuangan India menolak rekomendasi Otoritas Anti-Dumping India yaitu *Directorate General Trade Remedies* (DGTR) atas perpanjangan BMAD produk HRFPANA, yang salah satunya berasal dari Indonesia. Pembatalan BMAD produk HRFPANA dikeluarkan pada 4 Januari 2022.

Direktur Pengamanan Perdagangan Natan Kambuno menambahkan, bahwa sejak diberlakukannya BMAD pada 2017, nilai ekspor HRFPANA ke India mengalami tren penurunan sebesar 38%. India merupakan salah satu pasar potensial produk HRFPANA dengan pangsa pasar sebesar 5,8% dari total ekspor HRFPANA pada tahun 2020. Dengan dihentikannya pengenaan BMAD tersebut, ekspor HRFPANA ke India diharapkan akan meningkat.

Sumber: kontan.co.id

Jakarta, January 28, 2022 - Indonesia's export of hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel (HRFPANA) managed to be free of anti-dumping duties (ADD) to India. This happened because the Indian Ministry of Finance rejected the recommendation of the Indian Anti-Dumping Authority, namely the Directorate General Trade Remedies (DGTR) for the extension of the ADD for HRFPANA products, one of which came from Indonesia. Cancellation of ADD for HRFPANA products was issued on January 4, 2022.

Director of Trade Security, Natan Kambuno, added, since the enactment of the ADD in 2017, the export value of HRFPANA to India had decreased by 38 percent. India was one of potential markets for HRFPANA products with a market share of 5.8% of total HRFPANA exports in 2020. With the cessation of the ADD imposition, HRFPANA exports to India are expected to increase.

Source: kontan.co.id



PENEGASAN BIAYA PENCEGAHAN COVID 19

CONFIRMATION OF COVID 19 PREVENTION COSTS

By : Cita Widyawati

Jakarta, 28 Januari 2022 - Berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-183/PJ/PJ.03/2021, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penghasilan atau beban yang memiliki fungsi untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 (meliputi: tes pendeteksi Covid-19, masker, *antiseptic*, *handsanitizer*, *disinfectan*, suplemen kesehatan dan vaksinasi Covid-19 bagi pegawai, yang pendanaannya ditanggung dan dibebankan oleh pemberi kerja, dapat dibebankan secara fiskal. Syarat lainnya adalah beban tersebut tidak membedakan jabatan dan pada sisi karyawan penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan/objek yang dipotong PPh Pasal 21.

Sumber: Nota Dinas Nomor ND-183/PJ/PJ.03/2021

Jakarta, January 28, 2022 - Based on the Official Memorandum Number ND-183/PJ/PJ.03/2021, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia confirms that income or expenses that have a function to prevent the spread of the Covid-19 virus (including Covid-19 Detection Tests, Masks, Antiseptic, Hand Sanitizer, Disinfectant Health supplements and Covid-19 Vaccinations) for employees whose funding is borne and charged by the employer, can be charged fiscally. Another requirement is that the burden does not differentiate between positions and on the employee's side, the income is not income/object withheld by income tax Article 21

Source: Official Memorandum No. ND183/PJ/PJ.03/2021



Segera Update! Aplikasi M-Pajak Kini Punya Dua Fitur Baru Buat UMKM

UPDATE IMMEDIATELY! THE M-TAX APPLICATION NOW HAS TWO NEW FEATURES FOR MSMES

By : Vionnanova

Jakarta, 28 Januari 2020 - M-Pajak merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh DJP dengan tujuan memudahkan Wajib Pajak mendapatkan layanan perpajakan. M-Pajak dapat diunduh secara gratis melalui *Play Store* dan *App Store*. M-Pajak memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan Wajib Pajak, di antaranya: menu e-Billing, kartu NPWP digital, informasi KPP terdekat, pengingat batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak, serta informasi peraturan perpajakan terbaru.

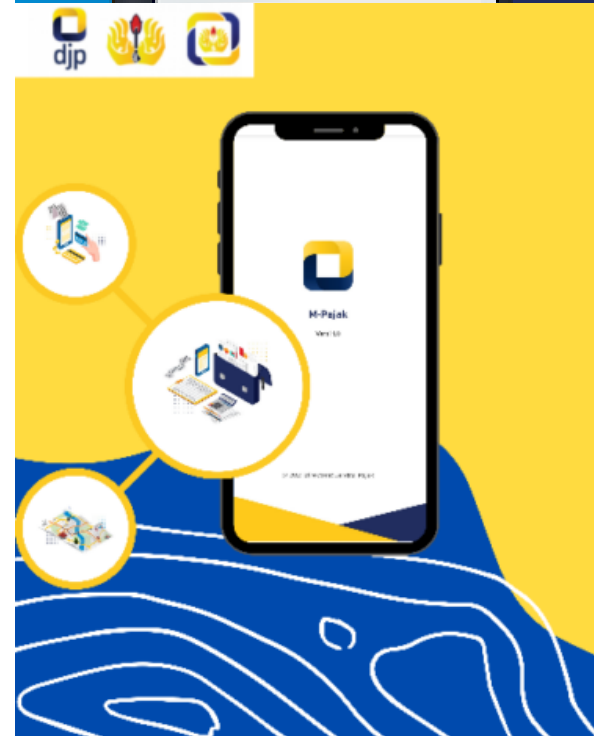
Saat ini, M-Pajak menambah dua fitur baru yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, yaitu: Fitur pencatatan UMKM dan fitur surat keterangan Peraturan Pemerintah No. 23/2018. Fitur pencatatan omzet disediakan untuk memudahkan Wajib Pajak UMKM dalam membayar PPh Final sesuai omzet yang diperolehnya serta dapat digunakan untuk menyusun SPT Tahunan.

Sumber: *ddtc.com*

Jakarta, January 28, 2022 - M-Tax is an application that was developed by DGT to make it easier for taxpayers to get tax services. M-Tax can be downloaded for free through the Play Store or the App Store. M-Tax has several features that can be used by taxpayers, including an e-Billing, digital Taxpayer Identification Number (TIN) cards, information on the nearest Tax Office (TO), reminders for tax payment and tax reporting deadlines, as well as information on the latest tax regulations.

Currently, M-Tax adds two new features that can be utilized by MSME, namely: the MSME recording feature and the certificate feature of Government Regulation (GR) No. 23/2018. The turnover/gross income recording feature is provided to make it easier for MSME taxpayers to pay final income tax according to gross income they earn and can also be used to prepare annual tax return.

Source: *ddtc.com*





CONTACT US

FENNY WIDJOJO
FENNY.WIDJOJO@PTPSI.COM

ABDUL KARIM
ABDUL.KARIM@PTPSI.COM

HERI PURWANTO
HERI.PURWANTO@PTPSI.COM

RUFFO EMRY MONIAGA
EMRY.MONIAGA@PTPSI.COM

ELLIS VERONIKA SITINJAK
ELLIS.VERONIKA@PTPSI.COM

[HTTPS://PTPSI.COM/](https://ptpsi.com/)



PT PRIME SERVICES INTERNATIONAL



PRIMESERVICES.ID



PSITAX_OFFICIAL